



# Jika Ditetapkan Tersangka, Ahok Copot Tri Djoko

**PEMANGGILAN** Kepala Dinas Tata Air DKI, Tri Djoko Sri Margianto oleh polisi terkait dugaan korupsi pembebasan tanah dalam proyek normalisasi Kali Pesanggrahan yang merugikan negara senilai Rp 32,8 miliar mengejutkan semua pihak.

Sebab, yang bersangkutan baru beberapa hari dilantik sebagai Kepala Dinas Tata Air oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok: Desakan agar Ahok mengambil langkah tegas pun bermunculan. "Harus diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Apalagi kalau dia diindikasikan melakukan korupsi tidak bisa ditolerir lagi," ujar Edi Gusyani, Direktur Aliansi Pemerhati Eksekutif dan Legislatif (APEL), kemarin (8/7).

Edi mengatakan apabila terbukti melakukan korupsi, Ahok harus berani memecat anak buahnya itu. Karena berhadapan dengan hukum risikonya masuk 'hotel prodeo'. Terlebih, yang bersangkutan menjabat sebagai kepala dinas. "Tidak lagi ada tawar menawar karena perbuatan korupsi harus diberantas habis," katanya juga.

Lebih lanjut, Edi juga mengkritisi pergantian jabatan di jajaran Pemprov DKI dari eselon IV ke III dan eselon III ke II yang dilaksanakan Gubernur Ahok. Lantaran pergantian pejabat itu diduga berdasarkan spekulasi, bukan berdasarkan kinerja dan kecakapan atau prestasi.

Penempatannya itu, katanya juga, penuh dengan ABS atau Asal Bapak Senang. "Harusnya ada evaluasi dan perbaikan dalam proses pergantian pejabat itu," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Ahok membantah dirinya kecolongan mengangkat Tri Djoko Sri Margianto sebagai Kepala Dinas Tata Air. "Nggak (kecolongan) juga. Kita sudah dengar kasusnya dan dia nggak salah. Belum ada surat

pemanggilan sebagai tersangka juga kan ya? Kan bukannya dia yang salah. Dia ditipu orang. Paling dipanggil saksi doang. Yang nipu kan bukan dia, yang nipu kan warga," kilah Ahok.

Namun Ahok memastikan, jika Tri Joko nantinya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, pihaknya akan langsung mencari pengganti Kadis Tata Air dan Bina Marga DKI itu. "Nggak apa-apa. Kalau memang jadi tersangka. Ya kita cari pengganti. Harus dikeluarin," jelas Ahok juga.

Untuk diketahui Tri Joko akan kembali dimintai keterangannya penyidik Polri kapasitasnya saat itu sebagai Ketua P2T proyek normalisasi Kali Pesanggrahan tahun 2013. Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni ABD dan JN (meninggal dunia), MD, HS dan M (buron). Namun, kepolisian memastikan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan.

Sebelumnya, Direskrimsus Polda Metro Jaya memanggil Kepala Dinas Tata Air DKI, Tri Djoko Sri Margianto, Selasa (7/7) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembebasan tanah proyek normalisasi Kali Pesanggrahan yang diduga merugikan negara Rp 32,8 miliar tersebut. Sayangnya, Tri Djoko tidak memenuhi panggilan pertama polisi pada Selasa (7/7).

Tri Djoko mengaku tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sehari sebelumnya karena harus berkonso-

lidasi dengan jajaran dinas yang baru dia pimpin. "Saya baru pindah jabatan. Baru satu hari dilantik, masa saya tinggal. Jadi, saya minta waktu untuk konsolidasi dulu," tandasnya juga.

Dia juga mengatakan, ada panggilan untuk dimintai keterangannya lagi, Kamis (9/7). "Tapi saya datang hari ini, Rabu (8/7). Supaya tidak menundakan. Saya sudah di Polda Metro Jaya sejak jam 10 pagi tadi untuk jalani pemeriksaan," terangnya juga. (wok)